

## DAFTAR PUSTAKA

- Ade, M., Ariwuni, D., & Kartika, I. N. (n.d.). *PENGARUH PDRB DAN PENGELOUARAN PEMERINTAH TERHADAP IPM DAN TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN / KOTA PROVINSI BALI* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana , Bali , Indonesia *PENDAHULUAN* Pada dekade terakhir ini , kemiskinan menjadi topik yang dibahas . 2927–2958.
- Adi, C. S. W. (2018). Indonesian Treasury Review. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(4), 330–346.
- Aprilia, Y., Chaidir, T., & Fadilyanti, L. (2019). EKONOMI DAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2010-2019 Grafik APBD Kab . Lombok Timur Tahun 2010-2019 ( Dalam Ratusan Ribu ). *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mataram Jl. Majapahit No. 62 - Mataram*, 1, 45–60.
- Arif Novriansyah, M. (2018). Pengaruh Pengangguran dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo. *Gorontalo Development Review*, 1(1), 59. <https://doi.org/10.32662/golder.v1i1.115>
- Badan Pusat Statistik. 2023. Statistik Pendidikan 2023. Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, Jakarta.
- Elshahawany, D. N., & Elazhary, R. H. (2024). Government spending and regional poverty alleviation: evidence from Egypt. *Asia-Pacific Journal of Regional Science*, 8(1), 111–135. <https://doi.org/10.1007/s41685-023-00318-2>
- Evita, M. J., & Primandhana, W. P. (2022). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Belanja Pemerintah terhadap Kemiskinan di Kabupaten Blora*. 10, 79–88. <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6693%0Ahttps://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/6693/REYNALDY BOY C. TAMPUBOLON.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Fithri, N., & Kaluge, D. (2017). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 129. <https://doi.org/10.22219/jep.v15i2.5360>
- Garza-Rodriguez, J. (2018). Poverty and economic growth in Mexico. *Social Sciences*, 7(10). <https://doi.org/10.3390/socsci7100183>
- Ginting, A. M., & Rasbin. (2010). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia sebelum dan setelah krisis. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 2(1), 279–312.
- Hidayat, A. Y., & Azhar, Z. (2022). Analisis Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Kesehatan, Pendidikan, Dan Infrastruktur Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 4(1), 65. <https://doi.org/10.24036/jkep.v4i1.13308>

- Idris Thahir, M., Semmaila, B., & Arfah, A. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Takalar. *Journal of Management Science (JMS)*, 2(1), 61–81. <https://doi.org/10.52103/jms.v2i1.323>
- Idris, N. A. (2022). *Analisis Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bone* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Ismi Rosyidatul Ummah, Achmad Alfian Azizi, & Muhammad Yasin. (2023). Pengaruh Kemiskinan Terhadap Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Khususnya Inflasi dan Pengangguran di Kota Surabaya. *Jurnal Manajemen Kreatif Dan Inovasi*, 1(3), 21–34. <https://doi.org/10.59581/jmki-widyakarya.v1i3.445>
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Profil Kesehatan Indonesia tahun 2019*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2021. *Profil Kesehatan Indonesia tahun 2020*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2022. *Profil Kesehatan Indonesia tahun 2021*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2023. *Profil Kesehatan Indonesia tahun 2022*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2024. *Profil Kesehatan Indonesia tahun 2023*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Lubis, C. A. B. E. (2014). Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan Pekerja Dan Pengeluaran Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Economia*, 10(2), 187–193.
- Maharani, K., & Isnowati, S. (2014). Kajian Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja dan Keterbukaan Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 21(1), 62–72.
- Mahendra A. (2021). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan, Inflasi dan Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating di Indonesia. *Jurnal MANAJERIAL*, 20(2), 174–186. <https://doi.org/10.17509/manajerial.v20i2.42133>
- Mahzalena, Y., & Juliansyah, H. (2019). Pengaruh Inflasi, Pengeluaran Pemerintah Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 2(1), 37. <https://doi.org/10.29103/jeru.v2i1.1742>
- Mansyur, K., Nursini, N., & Hamrullah, H. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. *Development Policy and Management Review (DPMR)*, 1(2), 79–107. <https://doi.org/10.61731/dpmr.vi.19005>
- Mehmood, R., & Sadiq, S. (2010). The Relationship between Government

- Expenditure and Poverty: A Cointegration Analysis. *Romanian Journal of Fiscal Policy*, 1(1), 29–37.
- Najib Putri, R. H., & Yuliana, I. (2023). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan dengan pengangguran sebagai mediasi di Probolinggo. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(6), 2691–2700. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i6.2531>
- Omodero, C. O. (2019). Government sectoral expenditure and poverty alleviation in Nigeria. *Research in World Economy*, 10(1), 80–90. <https://doi.org/10.5430/rwe.v10n1p80>
- Palenewen, T., Walewangko, E., & Sumual, J. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sekktor Kesehatan terhadap IPM dan Dampaknya terhadap Kemiskinan di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efesiensi*, 15(2), 1.
- Patricia, N., Izuchukwu, D., Anah, A., & Arinze, S. (2019). The Relationship Between Government Expenditure, Economic Growth and Poverty Reduction in Nigeria. *International Journal of Developing and Emerging Economies*, 7(2), 1–10. <https://doi.org/10.9790/5933-1002020108>
- Pither Palungan, I Made Benyamin, P. U. & I. T. A. (2009). an Analysis of Defining Factors of Economic Growth in East Kalimantan Province, Indonesia. *International Journal of Education and Research*, 29(1), 97–112. [https://circle.ubc.ca/handle/2429/23736%5Cnhttps://circle.ubc.ca/bitstream/2429/23736/3/ubc\\_2010\\_spring\\_gupta\\_abhay.pdf](https://circle.ubc.ca/handle/2429/23736%5Cnhttps://circle.ubc.ca/bitstream/2429/23736/3/ubc_2010_spring_gupta_abhay.pdf)
- Purwanti, S. D., & Rahmawati, F. (2021). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Indonesia. *Ecoplan*, 4(1), 32–44. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v4i1.231>
- Rai, N., Suda, N., & Utama, M. S. (2019). TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN / KOTA PROVINSI BALI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ( Unud ), Bali , Indonesia PENDAHULUAN Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh sebuah negara termasuk Negara Indo. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 8(7), 651–680.
- Ramadanti, V., Agussalim, & Suhab, S. (2023). The Effect of Regional Government Expenditures on Regional Development Inequality in Eastern Indonesia, 2015-2020. *International Journal of Research in Science, Commerce, Arts, Management and Technology*, 5(1), 410–421. <https://doi.org/10.48175/ijarsct-13062>
- Razak, A. R., Fernandes, A. A. R., & Saifullah, N. I. (2023). Moderation of village funds and mediation of agricultural sector growth on poverty in rural areas. *International Journal of Economics and Business Research*, 26(4), 463–483. <https://doi.org/10.1504/IJEBR.2023.134882>
- Reviane, I. (2017). The Mediating Effect of Inflation on the Effect of Tradeliberalization and Government Spending towards Welfare. *Journal of Applied Economic Sciences*, 1038–1047.
- Sinaga, N. (2015). *PENGARUH ALOKASI BELANJA BIDANG EKONOMI*

- TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2006 – 2015.* 151, 10–17.
- Soleh, A. (2015). Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 197–209. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v2i2.15>
- Sukartini, N. M., & Saleh, S. (2012). Pengujian Hukum Wagner dalam Perekonomian Indonesia Kajian Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 19(1), 1–24.
- Supratiyoningsih, L., & Nyoman, N. (2022). *Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di*. 11(01), 1–14.
- Susanto, R., & Pangesti, I. (2021). Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 7(2), 271. <https://doi.org/10.30998/jabe.v7i2.7653>
- Syamsuri TN, M. R., & Bandiyono, A. (2018). *Terhadap Peningkatan Ipm Dan Pengentasan Kemiskinan*. 11–28.
- Syawaluddin, S. (2015). Refleksi Atas Pemikiran Amartya Kumar Sen Tentang Ketimpangan Dan Kemiskinan. *Al-Buhuts*, 11(1), 1–10. <https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab/article/view/2060>
- Fithri, N., & Kaluge, D. (2017). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 129. <https://doi.org/10.22219/jep.v15i2.5360>
- Sinaga, N. (2015). *PENGARUH ALOKASI BELANJA BIDANG EKONOMI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2006 – 2015.* 151, 10–17.
- Utama, A. P. (2021). Implementasi Teori Dependensi Studi Kasus : Kebijakan Belt and Road Initiative Tiongkok Khususnya di Kawasan Afrika Timur. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 3(2), 1–17.
- Wadana, R., & Prijanto, W. (2016). *Analisis Pengaruh Infrastruktur, Tingkat Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali 2015-2020*. 2(6), 1–23.
- Wahyudi. (2020). Pengeluaran Pemerintah dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 103–113.
- Widodo, A., Waridin, W., & Kodoatje, J. M. (2012). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 25. <https://doi.org/10.14710/jdep.1.1.25-42>
- Wongkar, A. N. (2023). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 23 No . 3 Bulan Maret 2023 PENGARUH IPM , TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DAN DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Anjela N Wongkar<sup>1</sup>*,

*Tri Oldy Rotinsulu<sup>2</sup>, Mauna Th. B Maramis<sup>3 1 2 3</sup> Program Studi Ekonomi Pembangunan, F. 23(3), 49–60.*

# **LAMPIRAN**

## Lampiran 1 : Data yang digunakan

### 1. Data sebelum LN

Provinsi	Tahun	X	Y	Z1	Z2	Z3
Provinsi Aceh	2019	132,070	810,000	4,387,079,891,196.40	2,369,494,957,209.16	1,633,985,771,602.03
Provinsi Aceh	2020	131,581	815,000	3,909,952,437,146.01	2,019,099,252,946.01	1,055,365,437,507.51
Provinsi Aceh	2021	135,274	834,000	4,193,484,146,812.91	2,429,820,930,479.10	1,001,668,880,508.69
Provinsi Aceh	2022	140,972	807,000	3,857,454,024,445.78	2,141,834,146,057.69	3,098,940,583,160.76
Provinsi Aceh	2023	146,932	807,000	3,771,974,319,627.00	1,403,645,687,444.00	1,579,923,089,077.00
Provinsi Sumatera Utara	2019	539,514	1,261,000	5,784,899,908,257.15	540,117,396,199.00	754,346,713,368.40
Provinsi Sumatera Utara	2020	533,746	1,283,000	6,253,454,267,708.52	543,841,149,494.78	582,641,410,907.00
Provinsi Sumatera Utara	2021	547,652	1,344,000	6,233,338,369,264.14	865,343,160,238.90	1,309,293,421,146.51
Provinsi Sumatera Utara	2022	573,529	1,268,000	3,036,379,378,002.91	818,612,225,417.57	1,392,786,745,595.45
Provinsi Sumatera Utara	2023	602,236	1,240,000	4,426,644,844,574.00	774,654,470,796.00	2,699,657,031,038.00
Provinsi Sumatera Barat	2019	172,206	343,000	3,185,362,546,599.44	711,589,677,735.68	485,821,488,126.22
Provinsi Sumatera Barat	2020	169,427	344,000	3,029,424,275,392.33	653,547,259,294.54	336,784,963,880.01
Provinsi Sumatera Barat	2021	175,000	371,000	3,030,705,718,807.31	623,379,888,953.00	1,660,626,836,108.40
Provinsi Sumatera Barat	2022	182,629	335,000	2,222,357,429,375.88	759,531,196,284.46	1,018,898,393,085.00
Provinsi Sumatera Barat	2023	191,071	340,000	2,356,492,270,598.00	950,772,130,345.00	1,099,713,666,821.00
Provinsi Riau	2019	495,607	484,000	3,071,277,916,873.66	919,415,812,874.43	449,757,716,780.85
Provinsi Riau	2020	489,996	483,000	3,345,644,848,658.00	935,082,061,641.58	325,517,523,796.53
Provinsi Riau	2021	506,472	501,000	2,405,267,876,980.86	1,026,559,774,602.58	404,184,946,853.82
Provinsi Riau	2022	529,533	485,000	2,428,595,832,020.68	1,203,329,986,287.15	1,490,668,634,996.51
Provinsi Riau	2023	551,828	486,000	2,673,501,034,408.00	1,126,408,616,290.00	1,946,483,909,233.00
Provinsi Jambi	2019	149,111	273,000	1,653,980,458,766.00	487,782,082,582.86	362,191,616,318.45
Provinsi Jambi	2020	148,354	278,000	1,681,741,407,007.77	436,253,687,982.08	256,063,647,268.48
Provinsi Jambi	2021	153,851	294,000	1,688,985,653,990.15	572,128,487,366.16	577,250,426,219.86

<b>Provinsi Jambi</b>	<b>2022</b>	161,730	279,000	1,048,033,334,831.34	623,422,429,147.64	1,025,168,341,328.50
<b>Provinsi Jambi</b>	<b>2023</b>	169,269	281,000	1,138,635,027,720.00	578,842,829,976.00	1,255,462,427,977.00
<b>Provinsi Sumatera Selatan</b>	<b>2019</b>	315,465	1,067,000	3,024,481,333,676.33	349,042,361,462.79	304,909,545,569.99
<b>Provinsi Sumatera Selatan</b>	<b>2020</b>	315,129	1,082,000	3,293,576,426,129.66	378,897,258,262.59	275,684,515,226.30
<b>Provinsi Sumatera Selatan</b>	<b>2021</b>	326,405	1,114,000	3,361,667,000,274.75	528,107,828,990.59	1,782,649,629,197.21
<b>Provinsi Sumatera Selatan</b>	<b>2022</b>	343,460	1,045,000	2,235,106,619,708.00	723,702,346,397.43	1,286,964,618,644.46
<b>Provinsi Sumatera Selatan</b>	<b>2023</b>	360,911	1,046,000	2,781,721,920,257.00	793,527,497,661.00	1,168,012,175,381.00
<b>Provinsi Bengkulu</b>	<b>2019</b>	46,345	298,000	1,070,755,069,118.22	375,498,860,481.71	210,001,515,324.71
<b>Provinsi Bengkulu</b>	<b>2020</b>	46,338	303,000	1,152,607,778,107.94	329,098,236,811.12	150,759,473,614.50
<b>Provinsi Bengkulu</b>	<b>2021</b>	47,854	306,000	872,127,139,841.27	350,419,624,578.72	324,320,686,903.94
<b>Provinsi Bengkulu</b>	<b>2022</b>	49,916	297,000	846,064,546,938.92	249,997,701,740.16	377,878,312,941.25
<b>Provinsi Bengkulu</b>	<b>2023</b>	52,041	288,000	912,662,117,153.00	480,977,818,173.00	529,924,862,755.00
<b>Provinsi Lampung</b>	<b>2019</b>	244,378	1,041,000	2,757,056,389,564.00	550,208,465,493.01	319,789,167,487.00
<b>Provinsi Lampung</b>	<b>2020</b>	240,320	1,049,000	3,003,290,487,789.63	730,904,385,598.19	291,903,100,056.89
<b>Provinsi Lampung</b>	<b>2021</b>	246,966	1,084,000	2,927,972,001,881.42	853,683,577,751.83	398,265,937,009.00
<b>Provinsi Lampung</b>	<b>2022</b>	257,534	1,002,000	1,601,382,339,974.34	885,177,683,306.11	1,175,903,901,372.80
<b>Provinsi Lampung</b>	<b>2023</b>	269,241	971,000	1,791,289,096,400.35	686,982,121,219.15	1,559,734,710,854.40
<b>Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>	<b>2019</b>	53,942	67,000	832,044,950,475.81	242,317,929,113.26	259,583,649,965.21

<b>Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>	<b>2020</b>	52,706	68,000	994,127,105,039.99	231,252,059,455.54	218,511,498,057.93
<b>Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>	<b>2021</b>	55,370	73,000	820,822,849,620.61	261,901,195,757.07	186,964,247,913.74
<b>Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>	<b>2022</b>	57,805	67,000	657,648,398,255.00	297,874,638,868.28	408,203,982,447.00
<b>Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>	<b>2023</b>	60,338	69,000	933,751,754,514.00	326,688,640,714.00	510,928,320,771.00
<b>Provinsi Kepulauan Riau</b>	<b>2019</b>	181,878	128,000	1,043,952,056,680.81	365,910,231,968.16	288,796,617,553.59
<b>Provinsi Kepulauan Riau</b>	<b>2020</b>	174,959	132,000	1,031,111,058,859.82	382,975,956,994.34	314,403,314,382.68
<b>Provinsi Kepulauan Riau</b>	<b>2021</b>	180,952	144,000	1,232,798,110,669.85	385,538,463,988.89	404,361,903,956.73
<b>Provinsi Kepulauan Riau</b>	<b>2022</b>	190,164	152,000	871,086,578,773.33	411,170,248,531.68	690,385,911,018.45
<b>Provinsi Kepulauan Riau</b>	<b>2023</b>	200,044	143,000	994,493,783,700.00	499,815,929,690.00	658,359,109,046.00
<b>Provinsi DKI Jakarta</b>	<b>2019</b>	1,836,241	362,000	21,778,832,536,245.00	8,894,088,762,561.00	5,202,234,915,885.00
<b>Provinsi DKI Jakarta</b>	<b>2020</b>	1,792,291	481,000	14,609,639,319,060.00	9,389,559,100,422.00	1,815,697,863,949.00
<b>Provinsi DKI Jakarta</b>	<b>2021</b>	1,856,001	502,000	17,253,692,967,130.40	10,770,301,300,973.40	7,002,010,325,499.67
<b>Provinsi DKI Jakarta</b>	<b>2022</b>	1,953,489	502,000	14,316,436,823,198.00	10,085,450,875,162.00	14,574,159,470,930.00
<b>Provinsi DKI Jakarta</b>	<b>2023</b>	2,050,466	478,000	19,926,350,209,247.00	11,082,537,538,661.00	16,561,350,946,160.00
<b>Provinsi Jawa Barat</b>	<b>2019</b>	1,490,960	3,376,000	13,968,049,089,155.00	1,034,107,397,703.00	1,339,324,986,976.00

<b>Provinsi Jawa Barat</b>	<b>2020</b>	1,453,381	3,920,000	15,193,142,758,897.00	1,170,106,140,760.00	1,178,605,896,672.00
<b>Provinsi Jawa Barat</b>	<b>2021</b>	1,507,746	4,195,000	16,117,147,292,316.00	2,877,973,199,863.00	2,789,590,554,495.00
<b>Provinsi Jawa Barat</b>	<b>2022</b>	1,589,985	4,071,000	7,622,512,217,941.00	1,288,069,918,763.00	6,852,944,468,112.00
<b>Provinsi Jawa Barat</b>	<b>2023</b>	1,669,417	3,889,000	10,462,254,312,173.00	1,961,923,239,695.00	3,442,603,572,902.00
<b>Provinsi Jawa Tengah</b>	<b>2019</b>	991,517	3,679,000	7,115,768,680,821.00	1,907,322,924,817.00	645,026,153,862.00
<b>Provinsi Jawa Tengah</b>	<b>2020</b>	965,227	3,981,000	7,389,844,827,969.00	2,129,044,310,232.00	383,851,329,786.00
<b>Provinsi Jawa Tengah</b>	<b>2021</b>	997,321	4,110,000	11,543,455,647,397.00	2,923,882,874,213.00	1,719,167,073,465.00
<b>Provinsi Jawa Tengah</b>	<b>2022</b>	1,050,278	3,831,000	7,516,926,850,266.00	3,321,884,752,237.00	1,882,082,024,929.00
<b>Provinsi Jawa Tengah</b>	<b>2023</b>	1,102,563	3,792,000	8,390,323,670,000.00	3,531,914,960,000.00	2,035,533,713,000.00
<b>Provinsi DI Yogyakarta</b>	<b>2019</b>	104,485	441,000	1,286,706,275,751.00	176,183,254,162.00	169,027,340,395.34
<b>Provinsi DI Yogyakarta</b>	<b>2020</b>	101,699	476,000	1,749,091,858,303.00	177,229,164,975.00	129,015,634,397.00
<b>Provinsi DI Yogyakarta</b>	<b>2021</b>	107,373	506,000	2,350,388,789,942.09	235,307,572,894.00	329,045,210,852.34
<b>Provinsi DI Yogyakarta</b>	<b>2022</b>	112,901	455,000	1,990,570,504,122.00	220,182,949,738.27	783,130,716,929.29
<b>Provinsi DI Yogyakarta</b>	<b>2023</b>	118,627	448,000	2,395,281,391,054.00	368,263,410,349.00	512,960,029,246.00
<b>Provinsi Jawa Timur</b>	<b>2019</b>	1,649,896	4,056,000	10,668,364,475,357.80	4,145,424,042,436.64	2,532,985,154,578.41
<b>Provinsi Jawa Timur</b>	<b>2020</b>	1,611,393	4,419,000	11,013,785,349,687.70	4,352,441,798,182.64	1,402,366,056,257.31
<b>Provinsi Jawa Timur</b>	<b>2021</b>	1,668,754	4,573,000	12,721,759,783,782.40	5,101,242,757,064.75	1,771,798,262,372.81
<b>Provinsi Jawa Timur</b>	<b>2022</b>	1,757,875	4,181,000	8,601,010,946,189.66	5,332,362,187,224.95	3,879,259,498,300.10
<b>Provinsi Jawa Timur</b>	<b>2023</b>	1,844,809	4,189,000	8,803,945,005,984.00	5,176,188,076,500.00	3,404,169,559,903.00
<b>Provinsi Banten</b>	<b>2019</b>	456,620	641,000	3,922,491,950,606.88	595,943,852,472.26	523,698,951,407.50
<b>Provinsi Banten</b>	<b>2020</b>	441,149	776,000	4,297,645,835,835.16	686,606,527,511.00	320,256,514,714.00
<b>Provinsi Banten</b>	<b>2021</b>	460,953	867,000	4,198,949,931,852.49	892,634,579,616.19	1,409,755,365,048.24
<b>Provinsi Banten</b>	<b>2022</b>	484,131	814,000	2,853,744,409,250.94	1,298,700,809,084.39	1,476,912,020,529.88
<b>Provinsi Banten</b>	<b>2023</b>	507,427	826,000	3,242,667,911,431.00	1,162,303,981,657.00	1,614,233,409,740.00
<b>Provinsi Bali</b>	<b>2019</b>	162,693	157,000	1,864,571,326,869.35	561,046,854,207.80	267,366,651,708.43
<b>Provinsi Bali</b>	<b>2020</b>	147,499	165,000	1,897,583,612,038.14	420,840,480,684.12	35,522,666,665.00
<b>Provinsi Bali</b>	<b>2021</b>	143,872	202,000	2,675,142,818,788.77	618,257,545,730.22	269,242,824,348.46

<b>Provinsi Bali</b>	<b>2022</b>	150,830	206,000	1,988,298,585,236.61	565,871,518,566.78	1,767,988,490,145.99
<b>Provinsi Bali</b>	<b>2023</b>	159,448	194,000	2,456,096,141,501.00	651,840,528,202.00	1,490,333,729,288.00
<b>Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>	<b>2019</b>	93,872	706,000	1,934,350,297,217.00	685,096,678,254.43	350,713,808,968.00
<b>Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>	<b>2020</b>	93,289	714,000	2,016,609,717,685.01	746,862,130,123.00	321,343,350,590.00
<b>Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>	<b>2021</b>	95,438	747,000	2,026,909,085,586.25	792,578,301,246.86	399,073,593,340.00
<b>Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>	<b>2022</b>	102,074	732,000	1,191,631,780,189.00	892,651,300,299.00	1,812,123,727,903.57
<b>Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>	<b>2023</b>	103,906	751,000	1,844,046,924,064.00	663,874,892,194.00	841,756,010,112.00
<b>Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>	<b>2019</b>	69,389	1,129,000	2,720,581,385,057.00	338,809,707,738.76	301,492,083,818.00
<b>Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>	<b>2020</b>	68,810	1,154,000	3,004,543,216,193.00	406,204,296,825.25	255,375,082,968.00
<b>Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>	<b>2021</b>	70,541	1,169,000	2,793,969,363,971.00	467,353,649,839.19	302,757,913,895.00
<b>Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>	<b>2022</b>	72,695	1,132,000	1,770,341,455,614.10	456,211,388,581.94	1,161,158,603,792.00
<b>Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>	<b>2023</b>	75,258	1,141,000	2,226,414,364,018.00	634,660,765,579.00	537,275,514,864.00
<b>Provinsi Kalimantan Barat</b>	<b>2019</b>	137,243	370,000	2,094,661,591,681.00	446,382,124,494.00	484,093,749,037.74
<b>Provinsi Kalimantan Barat</b>	<b>2020</b>	134,743	367,000	2,349,016,088,249.00	512,293,463,193.00	371,932,023,952.02
<b>Provinsi Kalimantan Barat</b>	<b>2021</b>	141,212	368,000	1,486,773,512,574.02	675,409,795,474.00	306,279,039,920.00
<b>Provinsi Kalimantan Barat</b>	<b>2022</b>	148,369	350,000	1,531,632,295,933.00	787,334,106,675.00	1,041,762,539,322.00
<b>Provinsi Kalimantan</b>	<b>2023</b>	154,981	353,000	1,692,972,886,988.00	709,624,698,772.00	1,338,410,158,034.00

<b>Barat</b>						
<b>Provinsi Kalimantan Tengah</b>	<b>2019</b>	100,349	131,000	1,392,631,315,360.67	433,697,682,283.15	435,232,136,769.52
<b>Provinsi Kalimantan Tengah</b>	<b>2020</b>	98,934	133,000	1,604,309,982,942.29	519,262,873,023.00	302,521,907,637.28
<b>Provinsi Kalimantan Tengah</b>	<b>2021</b>	102,481	140,000	1,549,185,842,725.01	491,719,616,491.23	1,097,676,619,973.89
<b>Provinsi Kalimantan Tengah</b>	<b>2022</b>	109,095	145,000	952,732,383,054.45	294,575,065,894.00	1,316,329,497,190.31
<b>Provinsi Kalimantan Tengah</b>	<b>2023</b>	113,612	142,000	1,371,159,088,919.00	616,410,630,352.00	2,150,436,287,218.00
<b>Provinsi Kalimantan Selatan</b>	<b>2019</b>	133,284	190,000	3,968,671,385,286.60	810,807,943,725.48	550,843,563,081.00
<b>Provinsi Kalimantan Selatan</b>	<b>2020</b>	130,864	188,000	1,439,695,273,643.56	1,098,161,572,991.00	401,367,952,293.00
<b>Provinsi Kalimantan Selatan</b>	<b>2021</b>	135,425	208,000	2,008,864,658,987.68	1,058,317,673,759.42	394,062,749,649.00
<b>Provinsi Kalimantan Selatan</b>	<b>2022</b>	142,341	196,000	1,636,684,097,692.73	1,054,043,804,485.67	1,404,025,160,628.50
<b>Provinsi Kalimantan Selatan</b>	<b>2023</b>	149,231	189,000	1,622,034,320,911.00	1,203,630,768,466.00	1,441,478,496,168.00
<b>Provinsi Kalimantan Timur</b>	<b>2019</b>	486,523	221,000	2,350,865,051,074.12	1,273,659,317,136.75	610,042,888,778.81
<b>Provinsi Kalimantan Timur</b>	<b>2020</b>	472,393	230,000	1,855,301,426,763.43	1,241,711,645,698.64	673,021,655,991.58
<b>Provinsi Kalimantan Timur</b>	<b>2021</b>	484,440	242,000	2,100,208,358,812.49	1,287,724,176,599.03	1,792,877,210,543.00
<b>Provinsi Kalimantan Timur</b>	<b>2022</b>	506,159	236,000	2,521,481,845,972.40	1,611,801,924,805.14	1,938,744,345,742.19
<b>Provinsi Kalimantan Timur</b>	<b>2023</b>	537,630	231,000	3,678,551,894,291.00	1,613,027,058,436.00	3,843,457,435,572.00

<b>Provinsi Kalimantan Utara</b>	<b>2019</b>	61,418	49,000	428,742,656,758.43	319,423,251,294.96	214,134,505,466.49
<b>Provinsi Kalimantan Utara</b>	<b>2020</b>	60,746	52,000	511,259,379,047.74	381,266,170,455.68	204,358,440,821.31
<b>Provinsi Kalimantan Utara</b>	<b>2021</b>	63,168	53,000	651,650,558,254.08	378,922,201,027.12	449,923,518,425.66
<b>Provinsi Kalimantan Utara</b>	<b>2022</b>	66,528	49,000	590,331,621,750.35	419,673,877,178.32	508,697,045,280.27
<b>Provinsi Kalimantan Utara</b>	<b>2023</b>	69,817	48,000	663,255,520,202.00	350,769,751,893.00	828,291,189,748.00
<b>Provinsi Sulawesi Utara</b>	<b>2019</b>	89,009	189,000	1,429,561,707,528.00	529,874,195,258.00	356,636,518,136.00
<b>Provinsi Sulawesi Utara</b>	<b>2020</b>	88,126	192,000	1,491,340,284,960.00	705,681,985,326.00	235,328,538,638.00
<b>Provinsi Sulawesi Utara</b>	<b>2021</b>	91,791	196,000	1,417,112,390,507.00	553,488,732,925.00	885,727,250,994.00
<b>Provinsi Sulawesi Utara</b>	<b>2022</b>	96,768	185,000	1,073,563,046,405.04	548,758,084,002.13	555,879,004,600.67
<b>Provinsi Sulawesi Utara</b>	<b>2023</b>	102,070	189,000	1,179,764,085,535.00	414,144,702,215.00	399,058,757,629.00
<b>Provinsi Sulawesi Tengah</b>	<b>2019</b>	127,935	404,000	1,392,631,315,360.67	503,775,510,742.19	557,346,310,918.06
<b>Provinsi Sulawesi Tengah</b>	<b>2020</b>	134,153	399,000	1,677,097,393,138.86	523,637,526,804.90	434,098,048,123.48
<b>Provinsi Sulawesi Tengah</b>	<b>2021</b>	149,816	404,000	1,576,452,937,909.23	519,233,675,216.74	841,884,187,505.00
<b>Provinsi Sulawesi Tengah</b>	<b>2022</b>	172,625	388,000	1,588,401,094,565.86	520,850,103,404.31	842,876,249,009.42
<b>Provinsi Sulawesi Tengah</b>	<b>2023</b>	193,181	396,000	1,223,935,316,048.00	582,055,876,037.00	1,142,559,623,973.00
<b>Provinsi Sulawesi Selatan</b>	<b>2019</b>	330,506	760,000	3,968,671,385,286.60	810,807,943,725.48	732,251,435,122.92
<b>Provinsi Sulawesi Selatan</b>	<b>2020</b>	328,155	777,000	4,112,630,085,641.00	991,172,406,433.03	631,883,958,388.91
<b>Provinsi Sulawesi Selatan</b>	<b>2021</b>	343,395	785,000	2,907,973,605,923.31	729,005,456,827.34	1,000,458,929,770.40
<b>Provinsi Sulawesi Selatan</b>	<b>2022</b>	360,895	777,000	2,887,658,071,535.00	791,729,263,026.17	1,351,437,902,211.29
<b>Provinsi Sulawesi Selatan</b>	<b>2023</b>	377,162	789,000	3,189,981,244,840.00	796,974,622,652.00	2,040,022,268,799.00
<b>Provinsi Sulawesi Tenggara</b>	<b>2019</b>	94,054	300,000	1,599,395,644,974.00	404,458,135,536.05	401,932,163,686.00
<b>Provinsi Sulawesi Tenggara</b>	<b>2020</b>	93,446	302,000	1,698,388,144,957.00	447,033,962,556.00	339,638,734,396.00

<b>Provinsi Sulawesi Tenggara</b>	<b>2021</b>	97,275	319,000	1,163,073,388,006.00	363,869,300,824.00	1,142,577,982,468.00
<b>Provinsi Sulawesi Tenggara</b>	<b>2022</b>	102,656	310,000	1,375,092,495,122.00	413,721,230,171.00	1,371,326,608,513.00
<b>Provinsi Sulawesi Tenggara</b>	<b>2023</b>	108,153	322,000	1,454,248,453,834.00	535,150,836,700.00	942,298,352,533.00
<b>Provinsi Gorontalo</b>	<b>2019</b>	28,430	185,000	643,893,689,143.00	154,055,547,802.00	228,863,019,664.18
<b>Provinsi Gorontalo</b>	<b>2020</b>	28,425	185,000	693,769,555,862.00	170,146,505,869.00	166,826,994,385.36
<b>Provinsi Gorontalo</b>	<b>2021</b>	29,108	186,000	665,050,676,214.00	214,445,660,768.51	271,365,629,215.35
<b>Provinsi Gorontalo</b>	<b>2022</b>	30,284	185,000	514,517,329,498.00	194,100,742,504.70	409,702,979,642.08
<b>Provinsi Gorontalo</b>	<b>2023</b>	31,648	184,000	532,853,325,189.00	157,169,809,078.00	312,866,822,369.00
<b>Provinsi Sulawesi Barat</b>	<b>2019</b>	32,844	152,000	441,196,219,844.60	156,207,884,188.26	221,631,194,589.21
<b>Provinsi Sulawesi Barat</b>	<b>2020</b>	32,074	152,000	783,221,406,766.69	187,481,640,776.00	149,314,756,728.78
<b>Provinsi Sulawesi Barat</b>	<b>2021</b>	32,898	157,000	525,451,292,312.20	149,163,555,899.83	392,365,697,702.42
<b>Provinsi Sulawesi Barat</b>	<b>2022</b>	33,658	166,000	603,438,975,566.00	134,771,961,714.15	504,671,742,443.00
<b>Provinsi Sulawesi Barat</b>	<b>2023</b>	35,426	164,000	637,897,913,355.00	229,467,309,403.00	360,388,850,662.00
<b>Provinsi Maluku</b>	<b>2019</b>	31,049	320,000	838,775,199,018.22	262,799,125,639.58	300,560,087,137.01
<b>Provinsi Maluku</b>	<b>2020</b>	30,766	318,000	1,302,192,983,948.65	262,314,832,788.10	228,311,596,602.00
<b>Provinsi Maluku</b>	<b>2021</b>	31,881	322,000	1,172,578,617,020.02	246,400,336,810.36	705,357,791,862.84
<b>Provinsi Maluku</b>	<b>2022</b>	33,575	291,000	1,067,801,317,284.14	264,923,896,644.05	593,445,076,534.60
<b>Provinsi Maluku</b>	<b>2023</b>	35,322	302,000	1,105,898,964,605.00	325,096,039,297.00	499,891,169,855.00
<b>Provinsi Maluku Utara</b>	<b>2019</b>	26,598	87,000	888,435,796,501.33	260,735,343,940.98	293,871,066,532.00
<b>Provinsi Maluku Utara</b>	<b>2020</b>	28,031	86,000	904,284,754,996.00	269,665,354,803.49	209,070,634,509.65
<b>Provinsi Maluku Utara</b>	<b>2021</b>	32,739	87,000	636,310,210,151.62	347,596,398,038.74	740,409,033,814.78
<b>Provinsi Maluku Utara</b>	<b>2022</b>	40,248	80,000	648,822,013,391.10	281,990,462,953.14	807,377,972,639.07
<b>Provinsi Maluku Utara</b>	<b>2023</b>	48,495	84,000	1,044,906,646,961.00	394,006,723,176.00	1,081,447,709,184.00
<b>Provinsi Papua Barat</b>	<b>2019</b>	62,075	208,000	1,005,759,434,121.00	246,289,279,797.00	713,943,805,775.14
<b>Provinsi Papua Barat</b>	<b>2020</b>	61,604	209,000	1,017,782,249,291.00	114,043,203,426.00	480,235,235,329.00

<b>Provinsi Papua Barat</b>	<b>2021</b>	61,289	219,000	772,596,935,405.04	251,269,279,532.17	2,663,311,571,707.60
<b>Provinsi Papua Barat</b>	<b>2022</b>	62,519	219,000	727,929,667,084.00	220,197,954,044.00	2,262,353,053,422.00
<b>Provinsi Papua Barat</b>	<b>2023</b>	40,955	215,000	396,584,512,168.00	346,504,783,701.00	1,182,394,722,044.00
<b>Provinsi Papua</b>	<b>2019</b>	134,566	901,000	3,361,938,667,568.81	1,051,868,115,365.24	706,805,683,660.66
<b>Provinsi Papua</b>	<b>2020</b>	137,787	911,000	3,203,024,353,163.19	967,284,330,504.53	516,738,820,314.32
<b>Provinsi Papua</b>	<b>2021</b>	158,675	920,000	1,467,638,781,682.06	1,005,532,943,992.55	1,783,398,437,883.48
<b>Provinsi Papua</b>	<b>2022</b>	172,907	922,000	1,423,248,470,495.23	595,473,990,865.12	3,144,758,336,045.62
<b>Provinsi Papua</b>	<b>2023</b>	49,553	915,000	209,627,347,888.00	552,910,028,452.00	793,982,299,701.00

## 2. Data Sesudah LN

Provinsi	Tahun	LnY
<b>Provinsi Aceh</b>	<b>2019</b>	13.60479
<b>Provinsi Aceh</b>	<b>2020</b>	13.61094
<b>Provinsi Aceh</b>	<b>2021</b>	13.63399
<b>Provinsi Aceh</b>	<b>2022</b>	13.60108
<b>Provinsi Aceh</b>	<b>2023</b>	13.60108
<b>Provinsi Sumatera Utara</b>	<b>2019</b>	14.04742
<b>Provinsi Sumatera Utara</b>	<b>2020</b>	14.06471
<b>Provinsi Sumatera Utara</b>	<b>2021</b>	14.11116
<b>Provinsi Sumatera Utara</b>	<b>2022</b>	14.05295
<b>Provinsi Sumatera Utara</b>	<b>2023</b>	14.03062
<b>Provinsi Sumatera Barat</b>	<b>2019</b>	12.74549
<b>Provinsi Sumatera Barat</b>	<b>2020</b>	12.7484
<b>Provinsi Sumatera Barat</b>	<b>2021</b>	12.82396
<b>Provinsi Sumatera Barat</b>	<b>2022</b>	12.72189
<b>Provinsi Sumatera Barat</b>	<b>2023</b>	12.7367

Provinsi Riau	2019	13.08984
Provinsi Riau	2020	13.08777
Provinsi Riau	2021	13.12436
Provinsi Riau	2022	13.0919
Provinsi Riau	2023	13.09396
Provinsi Jambi	2019	12.51723
Provinsi Jambi	2020	12.53538
Provinsi Jambi	2021	12.59134
Provinsi Jambi	2022	12.53897
Provinsi Jambi	2023	12.54611
Provinsi Sumatera Selatan	2019	13.88036
Provinsi Sumatera Selatan	2020	13.89432
Provinsi Sumatera Selatan	2021	13.92347
Provinsi Sumatera Selatan	2022	13.85953
Provinsi Sumatera Selatan	2023	13.86048
Provinsi Bengkulu	2019	12.60485
Provinsi Bengkulu	2020	12.62149
Provinsi Bengkulu	2021	12.63134
Provinsi Bengkulu	2022	12.60149
Provinsi Bengkulu	2023	12.57072
Provinsi Lampung	2019	13.85569
Provinsi Lampung	2020	13.86335
Provinsi Lampung	2021	13.89617
Provinsi Lampung	2022	13.81751
Provinsi Lampung	2023	13.78608
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2019	11.11245

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2020	11.12726
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2021	11.19821
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2022	11.11245
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2023	11.14186
Provinsi Kepulauan Riau	2019	11.75979
Provinsi Kepulauan Riau	2020	11.79056
Provinsi Kepulauan Riau	2021	11.87757
Provinsi Kepulauan Riau	2022	11.93164
Provinsi Kepulauan Riau	2023	11.8706
Provinsi DKI Jakarta	2019	12.7994
Provinsi DKI Jakarta	2020	13.08362
Provinsi DKI Jakarta	2021	13.12636
Provinsi DKI Jakarta	2022	13.12636
Provinsi DKI Jakarta	2023	13.07737
Provinsi Jawa Barat	2019	15.0322
Provinsi Jawa Barat	2020	15.1816
Provinsi Jawa Barat	2021	15.2494
Provinsi Jawa Barat	2022	15.2194
Provinsi Jawa Barat	2023	15.17366
Provinsi Jawa Tengah	2019	15.11815
Provinsi Jawa Tengah	2020	15.19704
Provinsi Jawa Tengah	2021	15.22893
Provinsi Jawa Tengah	2022	15.15864
Provinsi Jawa Tengah	2023	15.1484
Provinsi DI Yogyakarta	2019	12.9968

Provinsi DI Yogyakarta	2020	13.07317
Provinsi DI Yogyakarta	2021	13.13429
Provinsi DI Yogyakarta	2022	13.02805
Provinsi DI Yogyakarta	2023	13.01255
Provinsi Jawa Timur	2019	15.21571
Provinsi Jawa Timur	2020	15.30142
Provinsi Jawa Timur	2021	15.33568
Provinsi Jawa Timur	2022	15.24606
Provinsi Jawa Timur	2023	15.24797
Provinsi Banten	2019	13.37078
Provinsi Banten	2020	13.56191
Provinsi Banten	2021	13.67279
Provinsi Banten	2022	13.60972
Provinsi Banten	2023	13.62435
Provinsi Bali	2019	11.964
Provinsi Bali	2020	12.0137
Provinsi Bali	2021	12.21602
Provinsi Bali	2022	12.23563
Provinsi Bali	2023	12.17561
Provinsi Nusa Tenggara Barat	2019	13.46737
Provinsi Nusa Tenggara Barat	2020	13.47864
Provinsi Nusa Tenggara Barat	2021	13.52382
Provinsi Nusa Tenggara Barat	2022	13.50354
Provinsi Nusa Tenggara Barat	2023	13.52916
Provinsi Nusa Tenggara Timur	2019	13.93684
Provinsi Nusa Tenggara Timur	2020	13.95874
Provinsi Nusa Tenggara Timur	2021	13.97166

Provinsi Nusa Tenggara Timur	2022	13.9395
Provinsi Nusa Tenggara Timur	2023	13.94742
Provinsi Kalimantan Barat	2019	12.82126
Provinsi Kalimantan Barat	2020	12.81312
Provinsi Kalimantan Barat	2021	12.81584
Provinsi Kalimantan Barat	2022	12.76569
Provinsi Kalimantan Barat	2023	12.77422
Provinsi Kalimantan Tengah	2019	11.78295
Provinsi Kalimantan Tengah	2020	11.7981
Provinsi Kalimantan Tengah	2021	11.8494
Provinsi Kalimantan Tengah	2022	11.88449
Provinsi Kalimantan Tengah	2023	11.86358
Provinsi Kalimantan Selatan	2019	12.15478
Provinsi Kalimantan Selatan	2020	12.1442
Provinsi Kalimantan Selatan	2021	12.24529
Provinsi Kalimantan Selatan	2022	12.18587
Provinsi Kalimantan Selatan	2023	12.1495
Provinsi Kalimantan Timur	2019	12.30592
Provinsi Kalimantan Timur	2020	12.34583
Provinsi Kalimantan Timur	2021	12.39669
Provinsi Kalimantan Timur	2022	12.37159
Provinsi Kalimantan Timur	2023	12.35017
Provinsi Kalimantan Utara	2019	10.79958
Provinsi Kalimantan Utara	2020	10.859
Provinsi Kalimantan Utara	2021	10.87805
Provinsi Kalimantan Utara	2022	10.79958
Provinsi Kalimantan Utara	2023	10.77896

Provinsi Sulawesi Utara	<b>2019</b>	12.1495
Provinsi Sulawesi Utara	<b>2020</b>	12.16525
Provinsi Sulawesi Utara	<b>2021</b>	12.18587
Provinsi Sulawesi Utara	<b>2022</b>	12.12811
Provinsi Sulawesi Utara	<b>2023</b>	12.1495
Provinsi Sulawesi Tengah	<b>2019</b>	12.90917
Provinsi Sulawesi Tengah	<b>2020</b>	12.89672
Provinsi Sulawesi Tengah	<b>2021</b>	12.90917
Provinsi Sulawesi Tengah	<b>2022</b>	12.86876
Provinsi Sulawesi Tengah	<b>2023</b>	12.88917
Provinsi Sulawesi Selatan	<b>2019</b>	13.54107
Provinsi Sulawesi Selatan	<b>2020</b>	13.5632
Provinsi Sulawesi Selatan	<b>2021</b>	13.57344
Provinsi Sulawesi Selatan	<b>2022</b>	13.5632
Provinsi Sulawesi Selatan	<b>2023</b>	13.57852
Provinsi Sulawesi Tenggara	<b>2019</b>	12.61154
Provinsi Sulawesi Tenggara	<b>2020</b>	12.61818
Provinsi Sulawesi Tenggara	<b>2021</b>	12.67295
Provinsi Sulawesi Tenggara	<b>2022</b>	12.64433
Provinsi Sulawesi Tenggara	<b>2023</b>	12.68231
Provinsi Gorontalo	<b>2019</b>	12.12811
Provinsi Gorontalo	<b>2020</b>	12.12811
Provinsi Gorontalo	<b>2021</b>	12.1335
Provinsi Gorontalo	<b>2022</b>	12.12811
Provinsi Gorontalo	<b>2023</b>	12.12269
Provinsi Sulawesi Barat	<b>2019</b>	11.93164
Provinsi Sulawesi Barat	<b>2020</b>	11.93164

Provinsi Sulawesi Barat	2021	11.964
Provinsi Sulawesi Barat	2022	12.01974
Provinsi Sulawesi Barat	2023	12.00762
Provinsi Maluku	2019	12.67608
Provinsi Maluku	2020	12.66981
Provinsi Maluku	2021	12.68231
Provinsi Maluku	2022	12.58108
Provinsi Maluku	2023	12.61818
Provinsi Maluku Utara	2019	11.37366
Provinsi Maluku Utara	2020	11.3621
Provinsi Maluku Utara	2021	11.37366
Provinsi Maluku Utara	2022	11.28978
Provinsi Maluku Utara	2023	11.33857
Provinsi Papua Barat	2019	12.24529
Provinsi Papua Barat	2020	12.25009
Provinsi Papua Barat	2021	12.29683
Provinsi Papua Barat	2022	12.29683
Provinsi Papua Barat	2023	12.27839
Provinsi Papua	2019	13.71126
Provinsi Papua	2020	13.7223
Provinsi Papua	2021	13.73213
Provinsi Papua	2022	13.7343
Provinsi Papua	2023	13.72668

## Lampiran 2 : Hasil Analisis Regresi

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.968	.101		128.295	.000
	X	-.086	.020	-.336	-4.211	.000
	XZ1	4.206E-14	.000	.781	4.905	.000
	XZ2	-5.150E-14	.000	-.428	-2.222	.028
	XZ3	9.240E-15	.000	.090	.696	.487

a. Dependent Variable: LnY

#### Lampiran 4 : Bukti Data

<b>RASIO MURID-GURU MENURUT PROVINSI DAN JENJANG PENDIDIKAN, TAHUN AJARAN 2022/2023</b>					
No.	Provinsi	SD	SMP	SMA	SMK
1	<b>ACEH</b>	10.03	8.34	9.46	7.66
2	<b>SUMATERA UTARA</b>	14.13	13.80	15.95	14.62
3	<b>SUMATERA BARAT</b>	12.75	11.02	13.49	11.57
4	<b>RIAU</b>	15.06	12.51	13.81	12.26
5	<b>JAMBI</b>	13.57	10.21	12.75	11.19
6	<b>SUMATERA SELATAN</b>	14.74	13.28	13.96	14.27
7	<b>BENGKULU</b>	12.12	10.66	12.52	9.89
8	<b>LAMPUNG</b>	13.86	13.66	14.27	13.92
9	<b>KEP. BANGKA BELITUNG</b>	16.81	16.08	17.02	14.30
10	<b>KEPULAUAN RIAU</b>	16.07	15.40	15.37	14.15
11	<b>DKI JAKARTA</b>	18.96	17.79	16.13	16.61
12	<b>JAWA BARAT</b>	20.91	18.52	18.81	18.46
13	<b>JAWA TENGAH</b>	15.15	16.82	16.75	17.12
14	<b>D I YOGYAKARTA</b>	13.42	14.65	13.56	12.93
15	<b>JAWA TIMUR</b>	13.81	15.09	15.67	15.80
16	<b>BANTEN</b>	20.85	18.27	17.45	18.18
17	<b>BALI</b>	14.89	16.66	16.45	14.96
18	<b>NUSA TENGGARA BARAT</b>	12.08	8.02	11.74	9.99
19	<b>NUSA TENGGARA TIMUR</b>	12.33	10.73	12.44	12.11
20	<b>KALIMANTAN BARAT</b>	14.31	13.64	16.04	16.63
21	<b>KALIMANTAN TENGAH</b>	10.79	10.40	11.93	10.71
22	<b>KALIMANTAN SELATAN</b>	11.83	11.93	13.21	13.36
23	<b>KALIMANTAN TIMUR</b>	15.79	14.70	15.44	15.37
24	<b>KALIMANTAN UTARA</b>	12.88	11.71	12.87	12.02
25	<b>SULAWESI UTARA</b>	11.45	10.87	12.99	11.40
26	<b>SULAWESI TENGAH</b>	11.32	9.99	13.75	10.96
27	<b>SULAWESI SELATAN</b>	12.50	11.07	14.39	11.94
28	<b>SULAWESI TENGGARA</b>	11.41	8.85	12.01	9.54
29	<b>GORONTALO</b>	12.89	10.11	14.99	9.98
30	<b>SULAWESI BARAT</b>	10.47	9.41	12.19	10.07
31	<b>MALUKU</b>	11.58	8.79	10.45	7.88
32	<b>MALUKU UTARA</b>	11.68	8.90	11.88	9.36
33	<b>PAPUA BARAT</b>	13.40	10.20	12.58	12.10
34	<b>PAPUA</b>	23.36	15.04	14.31	11.51
35	<b>INDONESIA</b>	15.00	13.95	14.85	14.99

Sumber : Kementerian Pendidikan, 2023



<b>IMPLEMENTASI KARTU TANI DI INDONESIA</b>				
<b>No.</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Data Petani di E-RDKK</b>	<b>Kartu Tani Tercetak</b>	<b>Selisih</b>
1.	Banten	272.338	296.875	24.537
2.	DI Yogyakarta	269.885	310.605	40.720
3.	DKI Jakarta	297	446	149
4.	Jawa Tengah	2.798.417	2.932.585	134.168
5.	Kepulauan Riau	2.543	3.171	628
6.	Maluku	10.820	12.230	1.410
7.	Maluku Utara	10.831	15.981	5.150
8.	Papua Barat	8.345	9.197	852
9.	Sulawesi Selatan	834.656	1.041.324	206.668
10.	Sulawesi Tengah	139.429	179.764	40.335
<b>JUMLAH</b>		<b>4.347.561</b>	<b>4.802.178</b>	<b>454.617</b>

Sumber : Kementerian Pertanian, 2020